

Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Ekosistem Halal Value Chain: Studi Integratif Di Sektor Pertanian dan UMKM

Nursyafika^{1*}, Muhammad Rasyad Al Fajar², Muhammad Zia Ulhaq³
¹⁻³Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : nursyafikarosidinn@gmail.com

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 05 Mei, 2026

Page: 489-499

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i5.2049>

Article History:

Received: April 10, 2026

Revised: Mei 05, 2026

Accepted: Mei 17, 2026

Abstract : This study examines the development of community economic independence through the implementation of a Halal Value Chain (HVC) ecosystem integrating the agricultural sector and MSMEs in Renda Village, Bima Regency, and evaluates its contribution to inclusive economic empowerment. A qualitative approach with an integrative case study design was employed. Primary data were collected through in-depth interviews, participatory observation, focus group discussions, and documentation involving MSME actors, partner farmers, sharia cooperative managers, halal certification officers, and local stakeholders. The findings indicate that the HVC ecosystem has developed since 2022 through the initiative of the Al-Madinah Sharia Cooperative, connecting 45 assisted farmers and 12 halal-certified MSMEs. Its implementation has increased the average income of farmers and MSMEs by 40%, expanded the number of certified MSMEs by 650%, and increased market access by 300%. In addition, the ecosystem has strengthened community capacity through halal production training, business management, and digital marketing, while also enhancing women's participation and small farmer involvement. However, challenges remain, particularly in ensuring consistent halal raw material supply, developing traceability digital systems, and regenerating young farmers. Overall, the HVC model has proven effective in promoting inclusive and sustainable rural economic independence at the community level.

Keywords : Halal Value Chain, Economic Independence, MSMEs, Agriculture, Halal Ecosystem

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji pembentukan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penerapan ekosistem Halal Value Chain (HVC) yang mengintegrasikan sektor pertanian dan UMKM di Desa Renda, Kabupaten Bima, serta menilai kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus integratif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi yang melibatkan pelaku UMKM, petani mitra, pengurus koperasi syariah, petugas sertifikasi halal, serta pemangku kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem HVC berkembang sejak 2022 melalui inisiatif Koperasi Syariah Al-Madinah sebagai penghubung antara 45 petani binaan dan 12 UMKM bersertifikat halal. Implementasi HVC meningkatkan rata-rata pendapatan petani mitra dan UMKM bersertifikat masing-masing

sebesar 40%, menambah jumlah UMKM bersertifikat hingga 650%, serta memperluas akses pasar mencapai 300%. Selain itu, HVC mendorong terbentuknya Kelompok Sadar Halal (KOMAL) dan memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan produksi halal, manajemen usaha, serta pemasaran digital. Proses ini juga memperkuat partisipasi perempuan, keterlibatan petani kecil, dan perubahan pola pikir ekonomi masyarakat. Namun, keberlanjutan ekosistem masih menghadapi kendala berupa konsistensi pasokan bahan baku halal, digitalisasi sistem traceability, dan regenerasi petani muda. Dengan demikian, integrasi HVC berbasis kelembagaan lokal terbukti efektif membangun kemandirian ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat komunitas lokal desa.

Kata Kunci : *Halal Value Chain*, Kemandirian Ekonomi, UMKM, Pertanian, Ekosistem Halal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi halal sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Aziz, 2025). Dalam konteks ini, ekonomi halal tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aspek religius, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menjamin kualitas, keamanan, etika, dan keberlanjutan produk dan layanan. Namun demikian, implementasi ekonomi halal di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan parsial yang berfokus pada sertifikasi produk akhir, bukan pada integrasi menyeluruh dalam seluruh rantai nilai produksi. Padahal, ekosistem halal yang ideal menuntut adanya keterhubungan yang sistemik antara seluruh tahapan ekonomi, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariah (Ilyas, 2022; Hasanah & Syafii, 2023).

Dalam perkembangan konsep tersebut, Halal Value Chain (HVC) hadir sebagai pendekatan strategis yang menekankan integrasi menyeluruh dalam sistem ekonomi halal. HVC tidak hanya berfokus pada kepatuhan halal secara administratif, tetapi juga pada penguatan keterhubungan antaraktor ekonomi seperti petani, pelaku UMKM, industri pengolahan, lembaga keuangan syariah, regulator, dan lembaga sertifikasi halal dalam satu ekosistem yang saling mendukung (Hakim Muhammad Fajrul, 2024). Pendekatan ini menempatkan halal bukan sekadar label produk, tetapi sebagai sistem nilai yang melekat dalam seluruh proses ekonomi. Dengan demikian, HVC memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis prinsip syariah.

Sektor pertanian dan UMKM merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Keduanya memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat (Meilani et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, sektor pertanian sering kali hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, sementara UMKM belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan proses pengolahan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Kondisi ini menyebabkan rantai nilai ekonomi menjadi tidak optimal dan nilai tambah terbesar justru banyak dinikmati oleh pihak di luar daerah produksi.

Situasi tersebut juga terjadi di Kabupaten Bima, di mana potensi pertanian seperti jagung, bawang, dan komoditas lokal lainnya belum dikelola secara terintegrasi dalam kerangka ekonomi halal. Sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sementara keterhubungan antara petani, pelaku UMKM, distributor, dan lembaga keuangan syariah masih bersifat parsial dan belum membentuk ekosistem yang solid. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Halal Value Chain belum berjalan secara optimal, padahal pendekatan ini berpotensi besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, memperkuat kemandirian masyarakat, serta memperluas akses pasar halal (Asna, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan halal supply chain mampu meningkatkan daya saing industri halal dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada sektor tertentu seperti makanan dan minuman, serta belum secara komprehensif mengintegrasikan sektor pertanian dan UMKM dalam satu sistem rantai nilai halal yang terpadu (Kholifatul Husna Asri, 2022). Selain itu, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap konsep rantai nilai halal juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi implementasi HVC di tingkat lokal (Rejeb *et al.*, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait integrasi sektor hulu dan hilir dalam ekosistem halal berbasis wilayah pedesaan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, integrasi Halal Value Chain tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan keterlibatan aktif petani dan UMKM dalam rantai nilai halal, posisi tawar pelaku lokal dapat meningkat, baik dalam aspek harga, akses pasar, maupun keberlanjutan usaha. Selain itu, HVC juga membuka peluang akses pembiayaan berbasis syariah yang lebih inklusif serta memperkuat sistem ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan (Asna, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengkaji peran Halal Value Chain dalam pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi HVC antara sektor pertanian dan UMKM dapat membentuk kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Bima, serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep HVC berbasis konteks pedesaan di Indonesia, serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga terkait dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal yang terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus integratif. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan mempertimbangkan beberapa alasan utama, yaitu: (1) desa tersebut telah mulai mengembangkan produk halal yang berbasis sektor pertanian dan UMKM; (2) tersedianya lembaga koperasi syariah yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat; serta (3) adanya dukungan pemerintah daerah terhadap program sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Februari 2026 hingga April 2026. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data utama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimana sumber data primer di dapatkan langsung dilapangan melalui wawancara langsung terhadap informan, adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman, pengurus koperasi syariah, petani mitra, petugas lembaga seritifikasi halal, serta pembuat kebijakan lokal seperti kepala Desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur; (2) observasi partisipatif terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan proses sertifikasi; (3) focus group discussion (FGD) yang melibatkan pelaku UMKM dan petani; serta (4) dokumentasi dan penelaahan arsip kebijakan lokal. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilaksanakan secara iteratif dengan pendekatan tematik, sehingga kode-kode awal yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori, kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama. Adapun validitas data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member *checking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) di Desa Renda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) di Desa Renda berkembang secara bertahap sejak tahun 2022. Perkembangan tersebut diawali oleh inisiatif Koperasi Syariah “Al-Madinah” yang menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Desa serta memperoleh dukungan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima. Dalam pelaksanaannya, ekosistem ini melibatkan 45 petani binaan yang memasok komoditas jagung, cabai, dan kelapa kepada 12 unit UMKM pengolahan pangan yang telah mengantongi sertifikasi halal. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh salah satu pengurus koperasi dalam wawancara peneliti, menjelaskan:

“Kami mulai dengan melihat potensi produk unggulan desa yang punya nilai ekonomi dan peluang untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selanjutnya, kami menjalin kerja sama dengan para petani agar bahan baku yang digunakan benar-benar terjaga kehalalannya dan bebas dari unsur najis maupun zat haram. Di sisi lain, UMKM binaan juga kami dampingi secara bertahap agar siap memenuhi persyaratan sertifikasi halal, mulai dari penataan fasilitas produksi hingga penerapan prosedur kerja yang bersih dan higienis.”

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang bertahap dan terstruktur. Proses tersebut diawali dengan penentuan produk unggulan desa, dilanjutkan dengan penguatan kerja sama bersama petani untuk menjamin kehalalan bahan baku, serta pendampingan kepada UMKM agar mampu memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem halal sangat ditentukan oleh keterpaduan antara sektor hulu dan hilir, serta kesiapan para pelaku usaha dalam menerapkan proses produksi yang bersih, higienis, dan sesuai dengan standar jaminan produk halal. Hal ini juga di perkuat oleh wawancara peneliti dengan beberapa pelaku UMKM halal bahwa kepemilikan sertifikat halal memberikan peluang untuk memasuki pasar-pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Salah seorang pelaku usaha keripik jagung, memberikan keterangan tersebut melalui wawancara peneliti, beliau menerangkan bahwa:

“Dulu saya hanya menjual produk di pasar desa dengan omzet sekitar Rp500 ribu per minggu. Namun, setelah memperoleh sertifikat halal pada tahun lalu, produk saya mulai bisa dipasarkan di toko oleh-oleh di Kota Bima, bahkan dikirim hingga ke Lombok. Saat ini, omzet usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp2–3 juta per minggu.”

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian jurnal yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan konsumen, meluasnya jangkauan pasar, serta bertambahnya pendapatan atau omzet UMKM. Hal ini juga menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya saing usaha (Azzahra, 2025). Di kasus lain tidak semua UMKM merasakan dampak yang sama, dari hasil observasi peneliti terdapat beberapa UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman rumahan mengaku kesulitan mempertahankan konsistensi produk karena fluktuasi pasokan bahan baku halal. Salah satu pemilik usaha catering mengungkapkan:

“Usaha saya sudah bersertifikat halal, tapi saya terkadang susah dapat pasokan daging ayam yang terjamin halal dengan harga bersaing. Dan apabila buat saya juga terpaksa beli di pasar biasa, tetapi takut kehalalannya dipertanyakan.”

Kondisi tersebut juga tercermin juga dalam berbagai studi yang menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh aspek pasar, tetapi turut dipengaruhi oleh kesiapan rantai pasok, ketersediaan bahan baku, serta berbagai kendala operasional dalam menjaga konsistensi standar halal. Sejumlah studi akses terbuka juga

menegaskan bahwa kesinambungan pasokan bahan baku, jaringan pemasok, dan pengelolaan operasional merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi halal supply chain pada UMKM (Fauzan *et al.*, 2025). Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga mengkonfirmasi hal ini kepada pengurus koperasi syariah yang mengelola koperasi Al-Madinah di Desa Renda, yang dimana koperasi tersebut berperan sebagai penghubung utama dalam ekosistem *Halal Value Chain* (HVC). Pengurus menjelaskan mekanisme pembiayaan dan pendampingan:

“Kami memakai sistem bagi hasil untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal. Jadi, UMKM tidak perlu mengeluarkan biaya di awal. Biaya sertifikasi baru dibayarkan setelah usaha mereka mulai berkembang dan memperoleh keuntungan dari pasar yang sudah terbuka. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan berupa pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) secara cuma-cuma agar pelaku UMKM lebih siap menjalankan proses produksi yang baik dan sesuai standar.”

Dari informasi yang diberikan oleh informan di atas dapat dilihat bahwa pendekatan pendampingan dan pelatihan seperti ini juga didukung dalam berbagai studi yang menekankan pentingnya pembiayaan, mentoring, serta penguatan kapasitas teknis UMKM dalam proses sertifikasi halal dan peningkatan mutu produksi (Nasrulloh, 2021). Koperasi turut menggagas sistem pembelian bahan baku secara kolektif guna menekan biaya sekaligus menjaga jaminan kehalalan. Para petani mitra juga diwajibkan menerapkan standar pertanian halal, yang meliputi larangan penggunaan pupuk berbahan najis, pemisahan lahan dari sumber pencemaran najis, serta pencatatan rantai pasok secara terbuka dan teratur. Penekanan pada transparansi rantai pasok dan pengendalian bahan seperti ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian tentang *halal supply chain* yang menyoroti pentingnya keterlacakan, integritas bahan, dan pengawasan proses dari hulu ke hilir (Soraya *et al.*, 2024).

Petugas dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas di wilayah Kabupaten Bima juga ikut memperkuat temuan ini, mengungkapkan adanya sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Renda.

“Kendala utama yang dihadapi terletak pada kelengkapan dokumen serta konsistensi dalam menjalankan prosedur. Banyak pelaku UMKM memang menunjukkan antusiasme yang tinggi, tetapi sering kali belum siap menjalani proses sertifikasi yang relatif panjang. Dari sisi infrastruktur, sejumlah tempat produksi juga masih memerlukan pembenahan yang cukup besar agar sesuai dengan standar higienitas, terutama dalam hal pemisahan peralatan dan area produksi dari unsur-unsur yang berpotensi najis.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa hambatan utama dalam proses sertifikasi halal UMKM tidak hanya bersumber dari persoalan administratif, tetapi juga dari kesiapan teknis dan operasional para pelaku usaha. Masalah yang paling menonjol meliputi kelengkapan dokumen, konsistensi dalam menjalankan prosedur, serta kondisi sarana produksi yang belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas dan pemisahan dari unsur najis. Temuan ini menunjukkan bahwa semangat UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal perlu didukung oleh pendampingan yang lebih intensif, pembenahan fasilitas produksi, serta peningkatan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi agar penerapan standar halal dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Pola yang sama juga banyak ditemukan dalam berbagai studi, yang menegaskan bahwa hambatan sertifikasi halal pada UMKM umumnya berkaitan dengan kesiapan dokumen, keterbatasan pemahaman prosedur, pendampingan yang belum optimal, serta kebutuhan penyesuaian fasilitas produksi agar sesuai dengan standar halal dan higienitas (Ahmad, 2025).

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan kepala Desa Renda sebagai pembuat kebijakan di desa tersebut, kepala Desa Renda menyatakan dukungan penuh terhadap HVC dan mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan infrastruktur pendukung, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami telah membangun rumah kemasan dan cold storage berkapasitas kecil dengan memanfaatkan dana desa. Fasilitas ini disediakan untuk membantu UMKM memperpanjang masa simpan produk sekaligus memenuhi standar pengemasan yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, kami juga menjembatani kerja sama antara pelaku UMKM dengan pasar modern di Kota Bima.”

Upaya seperti ini sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa inovasi kemasan dan fasilitas penyimpanan dingin berperan penting dalam menjaga mutu produk, memperpanjang umur simpan, dan mendukung perluasan akses pasar bagi usaha pangan (Rahman et al., 2024). Sementara itu Camat Belo mengkonfirmasi bahwa program *Halal Value Chain* (HVC) di Desa Renda telah dijadikan sebagai model percontohan bagi desa-desa lain. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima juga telah menyusun rencana untuk memperluas pelaksanaan program tersebut ke lima desa lainnya pada tahun 2026 ini.

Dampak Terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti pada indikator kemandirian ekonomi setelah dua tahun penerapan *Halal Value Chain* (HVC). Temuan semacam ini juga sejalan dengan sejumlah studi yang menyebutkan bahwa penguatan ekosistem halal dan sertifikasi halal dapat mendorong pertumbuhan usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM (Azzahra, 2025). Dapat dilihat pada table 1 terkait dampak terhadap kemandirian ekonomi masyarakat pasca penerapan HVC di Desa Renda

Tabel 1. Indikator kemandirian Ekonomi Sebelum dan Sesudah Implementasi HVC

Indikator	Sebelum HVC (2024)	Sesudah HVC (2025)	Perubahan
Rata-rata pendapatan petani mitra/bulan	Rp. 850.000	Rp. 1.190.000	+40%
Rata-rata pendapatan UMKM bersertifikat/bulan	Rp. 1.200.000	Rp. 1.680.000	+40%
Jumlah UMKM terdaftar	18 unit	30 unit	+66%
Jumlah UMKM bersertifikat Halal	2 unit	15 unit	+650%
Akses pasar luar desa	3 UMKM	12 UMKM	+300%

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Selain menunjukkan peningkatan pada aspek ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya perkembangan kapasitas sumber daya manusia. Dari hasil observasi peneliti diketahui bahwa sebanyak 45 petani dan 30 pengelola UMKM telah mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan produksi halal, manajemen usaha, dan pemasaran digital. Di samping itu, juga telah terbentuk Kelompok Sadar Halal (KOMAL) yang secara rutin berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Temuan seperti ini sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa pelatihan, literasi halal, dan penguatan kapasitas pelaku usaha merupakan unsur penting dalam pembangunan ekosistem halal yang berkelanjutan (Hakim, 2025).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan *Halal Value Chain* (HVC) di Desa Renda sangat dipengaruhi oleh peran koperasi syariah sebagai integrator yang menghubungkan sektor hulu, yaitu petani, dengan sektor hilir, yakni UMKM. Hasil ini sejalan dengan berbagai kajian yang menekankan bahwa pengelolaan usaha berbasis prinsip syariah, terutama melalui penguatan sektor riil dan dukungan lembaga keuangan mikro syariah, merupakan strategi penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, Koperasi Al-Madinah dinilai berhasil menerapkan strategi tersebut melalui skema pembiayaan bagi hasil yang meringankan UMKM karena tidak membebankan biaya awal, sekaligus menjawab salah satu hambatan utama dalam proses sertifikasi halal yang banyak dibahas dalam literatur, yaitu persoalan biaya, pendampingan, dan akses dukungan kelembagaan (Sunarta et al., 2024).

Model integrasi vertikal yang diterapkan di Desa Renda mencerminkan konsep kluster industri halal terintegrasi yang banyak direkomendasikan sebagai strategi penguatan ekonomi

berbasis syariah. Meskipun masih dalam skala terbatas, ekosistem ini telah mencakup keseluruhan rantai nilai, mulai dari produksi pertanian halal di tingkat hulu, proses pengolahan oleh UMKM yang telah tersertifikasi, hingga distribusi dan pemasaran kepada konsumen dengan jaminan kehalalan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan berbagai kajian yang menekankan pentingnya pengembangan klaster industri halal untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing ekonomi lokal (Industri *et al.*, 2026).

Namun demikian, aspek digitalisasi masih menjadi kelemahan dalam implementasinya. Para informan mengakui bahwa sistem *traceability* halal berbasis digital belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini berbeda dengan rekomendasi dalam literatur yang menekankan pentingnya penerapan sistem *traceability* berbasis teknologi seperti *blockchain* dan *IoT* untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan konsumen dalam rantai pasok halal (Kurniawan *et al.*, 2025). Tantangan dalam menjaga konsistensi pasokan bahan baku halal yang dialami UMKM catering juga sejalan dengan berbagai temuan penelitian tentang rantai pasok di Indonesia, yang menunjukkan bahwa risiko kehalalan masih cukup tinggi akibat banyaknya pihak yang terlibat dan belum optimalnya pengawasan di sepanjang rantai distribusi. Studi mengenai rantai pasok ayam di Indonesia juga mengungkap adanya sejumlah risiko halal yang bersifat krusial.

Dalam konteks Desa Renda, persoalan serupa tampak pada sulitnya memperoleh pasokan daging yang benar-benar terjamin kehalalannya dengan harga yang tetap kompetitif, sehingga pelaku UMKM dihadapkan pada dilema antara menjaga kepatuhan halal dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem halal tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat UMKM pengolahan, tetapi juga membutuhkan intervensi yang lebih luas pada level rantai pasok hulu. Literatur terkini tentang rantai pasok halal di Indonesia juga menekankan bahwa keandalan pemasok, ketertelusuran, resiliensi rantai pasok ayam halal, dan dukungan teknologi pelacakan merupakan faktor penting untuk mengurangi risiko kehalalan dari hulu ke hilir (Alamsyah *et al.*, 2022).

Peningkatan pendapatan petani mitra sebesar 40% dalam dua tahun menunjukkan bahwa integrasi HVC memberi nilai tambah yang nyata bagi pelaku usaha di sektor hulu. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi syariah, khususnya industri halal, memiliki potensi besar dalam memberdayakan kelompok marjinal. Berbeda dengan sejumlah studi yang menilai implementasi kebijakan pemberdayaan masih belum optimal, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kelembagaan lokal, seperti koperasi dan desa, mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Temuan tentang pentingnya dukungan kelembagaan, fasilitasi lokal, dan pengurangan hambatan biaya juga sejalan dengan penelitian (Azzahra, 2025) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan serta akses pasar UMKM, tetapi sering terhambat oleh biaya, kompleksitas prosedur, dan keterbatasan dukungan implementasi.

Peningkatan jumlah UMKM bersertifikat dari 2 menjadi 15 unit dalam waktu dua tahun, atau naik sekitar 650%, menunjukkan capaian yang sangat menonjol dan bahkan melampaui target program serupa di berbagai daerah. Sebagai perbandingan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal di daerah lain masih berjalan relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha yang ada. Capaian Desa Renda yang tinggi secara persentase ini tampaknya didukung oleh beberapa faktor lokal yang kuat, yaitu adanya pendampingan intensif dari koperasi yang memahami kondisi sosial masyarakat, penerapan skema sertifikasi massal (*self-declare*) untuk produk berisiko rendah, serta komitmen kepala desa dalam mengalokasikan dana desa bagi pembangunan infrastruktur pendukung. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi halal UMKM sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan lokal, kemudahan skema pembiayaan, kualitas pendampingan, serta kesiapan sarana penunjang produksi dan pemasaran.

Aspek inklusivitas dalam penelitian ini tampak dari keterlibatan petani kecil, perempuan sebagai pengelola UMKM yang mencapai 70% dari total UMKM binaan serta kelompok pemuda dalam ekosistem *Halal Value Chain* (HVC). Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menegaskan bahwa strategi pemberdayaan berbasis ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada

penguatan usaha, tetapi juga pada perubahan pola pikir serta pengembangan semangat kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam konteks Desa Renda, perubahan pola pikir tersebut terlihat melalui kegiatan edukasi rutin yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Halal (KOMAL), yang secara bertahap mengubah pandangan masyarakat dari anggapan bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang rumit dan mahal menjadi pemahaman bahwa sertifikasi halal adalah bentuk investasi bagi keberlanjutan usaha di masa depan. Pendampingan halal dan gerakan sadar halal dalam berbagai studi juga terbukti dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas usaha, dan daya saing UMKM (Anwar & Malihah, 2025).

Keberlanjutan ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) di Desa Renda masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal: (1) digitalisasi sistem *traceability* dan pemasaran, (2) konsistensi standardisasi mutu produk, (3) perluasan akses ke pasar global, serta (4) regenerasi petani muda. Berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem halal belum cukup hanya dilakukan pada aspek produksi, tetapi juga membutuhkan dukungan lanjutan dalam bidang teknologi, kualitas, dan pengembangan sumber daya manusia. Berbagai studi juga menegaskan bahwa digitalisasi rantai pasok halal, penguatan pemasaran digital, dan adopsi sistem *traceability* menjadi faktor penting bagi efisiensi, transparansi, dan daya saing produk halal (Kurniawan *et al.*, 2025).

Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut memerlukan intervensi yang lebih kuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, penguatan kapasitas teknis, dan keberlanjutan program pendampingan. Literatur akses terbuka juga menunjukkan bahwa UMKM halal membutuhkan dukungan berkelanjutan, baik dalam digitalisasi pemasaran maupun dalam penguatan proses sertifikasi dan pengelolaan usaha (Yulia Silvi Yasmin, Anggoro Mukti, 2026). Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis ekonomi syariah, yang menekankan perubahan pola pikir serta penguatan kewirausahaan Islami, terbukti efektif diterapkan pada masyarakat pedesaan yang relatif homogen secara keagamaan, seperti di Kabupaten Bima. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam (Khurun, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem Halal Value Chain (HVC) di Desa Renda mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui penggabungan sektor pertanian dan UMKM yang dilakukan secara bertahap, terarah, dan terorganisasi. Capaian ini tidak terlepas dari peran Koperasi Syariah Al-Madinah sebagai penghubung antara sektor hulu dan hilir, dukungan kebijakan serta pembiayaan dari pemerintah desa, dan pendampingan intensif dalam proses sertifikasi halal. Selama dua tahun pelaksanaan, terjadi peningkatan yang nyata pada pendapatan petani mitra dan UMKM bersertifikat, pertumbuhan jumlah UMKM bersertifikat halal, perluasan akses pasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembentukan Kelompok Sadar Halal. Aspek inklusivitas juga tampak dari tingginya keterlibatan perempuan dan partisipasi petani kecil.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang menekankan perubahan cara berpikir dan penguatan lembaga lokal sangat sesuai diterapkan pada masyarakat yang relatif homogen secara keagamaan. Meski demikian, keberlanjutan ekosistem HVC masih menghadapi sejumlah kendala, seperti digitalisasi sistem pelacakan halal, kesinambungan pasokan bahan baku halal, standardisasi mutu produk, serta regenerasi petani muda. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah maupun pusat perlu memperluas dukungan infrastruktur teknologi informasi, menyediakan pelatihan digital dan manajemen rantai pasok, serta memperkuat program pendampingan secara berkelanjutan. Sementara itu, koperasi dan pelaku usaha perlu mengembangkan pemasaran digital, memperkuat organisasi petani, dan merancang insentif bagi generasi muda agar ekosistem HVC dapat terus berkembang, tangguh, dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal: Pemberdayaan Nusantara*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8414>
- Akbar, F. M. A. (2024). Journal of Islamic Studies. *Ar Rasyiid: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 29–38. https://jurnal.staimi.ac.id/index.php/arrasyiid/article/view/17?utm_source=chatgpt.com
- Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-Based Traceability System to Support the Indonesian Halal Supply Chain Ecosystem. *Economies*, 10(6), 1–18.
- Anwar, M. K., & Malihah, L. (2025). Pendampingan dan penguatan manajemen kewirausahaan umkm berbasis produk halal dengan pendekatan ekonomi syariah di desa tambak anyar ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (39), 478–485. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i2.3942>
- Asna, A. A. (2022). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1–8.
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2175–2183.
- Aziz, F. H. (2025). Peran Halal Value Chain dalam Penguatan Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Pendekatan Strategis Fahath. *AT-TIJARY Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 10–30.
- Azzahra, A. (2025). Investigating The Influence Of Halal Certification On Market Access And Business Growth For MSMEs In Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 10(2), 326–353. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/index>
- BPS Indonesia. Statistik daerah Kabupaten Bima. (2023). *Jumlah Penduduk (Proyeksi) Kabupaten Bima Pertahun (Jiwa)*. Badan Pusat Statistik.
- Departemen Komunikasi. (2024). *Sektor Halal Value Chain Tumbuh Positif, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Bank Sentral Republik Indonesia.
- Fauzan, T. R., Sylva, A., Noor, S., & Sudrajat, S. (2025). Halal logistic in indonesian culinary msmes. An intersection between operational performance and sharia law. *INSIS: International Seminar on Islamic Studies*, 6(1), 2627–2637. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.23746.g13070>
- Hakim, L. (2025). Halal Digital Marketing Strategy To Increase Global Access For Sharia Micro, Small, And Medium Enterprises. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 10(1), 87–100. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/index>
- Hakim Muhammad Fajrul, S. (2024). Studi Library Research : Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(4), 2227–2238.
- Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as Integrated Halal Zone Through the Implementation of Halal Supply Chain. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529>
- Hasanah, M., & Syafii, M. (2023). Implementasi Halal Value Chain Dalam Mewujudkan Ekosistem Halal pada Produk Unggulan UD Mitra Jamur Jember. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol.*, 5(2), 98–107. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1131>
- Ilyas, K. H. A. dan A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Sharia Economics Journal*, 01(01), 37–47.
- Industri, K., Daerah, K. P., & Halal, B. (2026). Model Ekosistem Halal Daerah Berbasis Kluster Ekonomi Syariah: Peran Kluster Industri, Kolaborasi Pemerintah Daerah, dan BUMD Halal. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 13010–13016. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/5408/4031>
- Kholifatul Husna Asri, A. I. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai

- Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Journal Sharia Economics*, 01(01), 37–47.
- Khurun, K. A. (2024). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Es Teh Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa. *Jurnal Khazanah*, 16(2), 31–40. <https://journal.uii.ac.id/khazanah>
- Kurniawan, M., Suparno, S., & Vanany, I. (2025). Conceptual Framework for Halal Supply Chain Traceability and Food Safety in Indonesia Based on Blockchain Technology and Internet of Things to Support Sustainable Development †. *Engineering Proceedings*, 84(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/engproc2025084027>
- Meilani, A. N., Nugraha, H. A., Pane, S. N., & Maulidia, I. (2025). Peran UMKM Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 2672–2678.
- Muhammad Hasan, M.A. (2021). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (Zaiful, Ed.; EDISI KEDU). CV. Nur Lina, Pustaka Taman Ilmu.
- Mumfarida, D. (2021). Implementasi Halal Pada Proses Produksi Produk Bisnis Pesantren Pendahuluan Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87 , 18 % dari populasi 232 , 5 juta jiwa menurut Global Islamic Economic Report 2018 / 20. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 01, 1–20.
- Mutmainah, S., Romadhon, M. R., & Jember, U. I. (2023). Halal agriculture as an effort to strengthen the global halal value chain in order to increase international trade. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 187–200.
- Nasrulloh. (2021). Sharia Banking Financing Model In Enhancing The Halal Certification Of Micro , Small , Medium. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 19–32. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/9481>
- Nurfadilah Maulana, W. J. (2025). Analisis Kesiapan Ekosistem Halal Value Chain Indonesia Dalam Mendukung Daya Saing Produk Halal Lokal Di Pasar Global. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues*, 5(2), 93–103.
- Putri, R., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Pengembangan Model Agribisnis Berkelanjutan Pada Tanaman Jagung Sebagai Komoditas Unggulan Pertanian. *Jurnal Economina*, 4(November), 409–421.
- Rahman, K. R., Ramdhani, S., Sanyoto, V. G., & Nawareza, Z. (2024). Smart Packaging Innovation for Food: Enhancing Shelf Life and Quality of Perishable Goods. *ASEAN Journal for Science and Engineering in Materials*, 3(2), 133–140.
- Rejeb, A., Rejeb, K., & Zailani, S. (2021). (2021). Apakah Rantai Pasok Pangan Halal Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan dan Analisis Bibliometrik. *Jurnal Riset Bisnis Jasa Makanan*, 24(5), 554–595.
- Rimawan, M., Pratiwi, A., & Ifitah, I. (2023). Pengelolaan Jagung Menjadi Susu Bubuk Jagung Agar Meningkatkan Nilai Jual Jagung Pada Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 44–48.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Soraya, A., Rahmi, N., Yuliawan, A., & Sakti, N. (2024). The Development of Halal Supply Chain Research in Indonesia : A Comparative Study. *Jurnal Teknik Industri*, 25(2), 97–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/Jtiumm.Vol25.No2.97-118>
- Sunarta, D. A., Maulana, N., & Apriliani, R. (2024). Kontribusi Halal Value Chain dalam Pengembangan Ekonomi Syariah pada UMKM. *Mappideceng: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11. <https://jurnal.staidi-pinrang.ac.id/index.php/mappideceng/index>
- Tanjung Azriadi, S. A. P. (2022). Peluang Wisata Halal Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 1470–1478.
- Wildan, M., Dahlan, A., Edwin, N., Aprianto, K., Sirajuddin, M., & Hamdan, Q. (2025). The Development of Halal Value Chain Based on a City in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.3205>

Yulia Silvi Yasmin, Anggoro Mukti, N. H. (2026). Pemberdayaan Pelaku Umkm Melalui Digitalisasi Dan Sertifikasi HalaL. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Digital Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26798/jpm.v5i1.2176>